



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PELUANG INDUSTRI NASIONAL PASCA-KESEPAKATAN IEU-CEPA

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setelah hampir 10 tahun perundingan, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (UE) akhirnya menyepakati perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA*). Perjanjian tersebut disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia pada tanggal 13 Juli 2025. Kesepakatan prinsip (*Agreement in principle*) ditargetkan selesai pada September 2025, setelah 19 putaran negosiasi sejak Juli 2016. Kesepakatan prinsip tersebut mencerminkan kedua pihak menyepakati seluruh bab dalam perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/FTA*).

Kesepakatan IEU-CEPA disambut positif oleh dunia usaha sebagai peluang besar bagi sektor industri nasional. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyebut selesainya perundingan ini sebagai “angin segar” bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan perikanan yang diproyeksikan mendapat peningkatan akses pasar lebih luas ke Eropa. Ketua Umum KADIN Indonesia, Sarman Simanjorang, turut menyambut kesepakatan ini sebagai kabar baik dan menekankan pentingnya pemanfaatan secara maksimal dari IEU-CEPA, meskipun ada sejumlah persyaratan teknis dan regulatif yang harus dipenuhi agar produk Indonesia dapat diterima di pasar Uni Eropa.

IEU-CEPA bukan sekedar perjanjian bebas tarif, melainkan sebuah bentuk kemitraan strategis yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi secara menyeluruh antara Indonesia dan UE. Tercapainya kesepakatan IEU-CEPA membuka peluang bagi sektor industri nasional untuk mengoptimalkan potensi ekspor, berkat sejumlah keuntungan yang ditawarkan. Salah satu keuntungannya adalah peningkatan akses pasar ke UE melalui penghapusan tarif impor bagi sekitar 80% produk ekspor Indonesia. Produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, hingga produk pertanian akan memasuki pasar Eropa tanpa beban tarif. IEU-CEPA juga berperan dalam mendorong daya saing nasional. Penghapusan tarif impor dan standar tinggi dalam perjanjian IEU-CEPA membuka peluang alih teknologi dan peningkatan kualitas produksi dalam negeri yang akan menjadikan produk Indonesia lebih kompetitif. Keuntungan lainnya adalah adanya perluasan dan diversifikasi pasar ekspor, selain pasar Amerika Serikat yang mengenakan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari Indonesia. Perluasan pasar menciptakan peluang strategis bagi sektor industri, khususnya karena UE merupakan kawasan dengan potensi tinggi—dengan populasi yang melebihi 440 juta jiwa—yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penetrasi dan pemasaran produk Indonesia.

Peningkatan kinerja ekspor industri akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Melalui IEU-CEPA, nilai ekspor Indonesia ke UE diperkirakan dapat melonjak lebih dari 50% dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan. Hal ini menandakan potensi ekspansi ekonomi yang kuat, khususnya di sektor manufaktur dan industri padat karya. Selain itu, perjanjian ini diharapkan turut memperkuat tren surplus perdagangan yang telah tercatat sebelumnya, yakni sebesar US\$4,5 miliar pada tahun 2024 dan US\$2,33 miliar untuk periode

Januari-April 2025. Dengan berlanjutnya tren positif tersebut, IEU-CEPA dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk pembukaan lapangan kerja dalam skala besar dengan estimasi kebutuhan tenaga kerja mencapai satu juta orang.

Optimalisasi manfaat IEU-CEPA menuntut kesiapan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga institusi terkait, dalam mengantisipasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam upaya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada eksportir, termasuk memperkuat daya saing terhadap negara-negara kompetitor. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne Patricia Sutanto, menekankan perlunya penguatan infrastruktur, akselerasi transisi menuju energi terbarukan dan bersih—yang kini menjadi standar baru ekspor ke UE—serta penyederhanaan perizinan agar peningkatan kapasitas industri, khususnya TPT, dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, aspek regulatif seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) juga perlu dicermati, agar produk kelapa sawit Indonesia tetap dapat diterima di pasar UE. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial untuk memastikan tersedianya regulasi yang mendukung dan kondusif bagi industri dalam mengoptimalkan peluang dari IEU-CEPA.

Atensi DPR

Kesepakatan IEU-CEPA menciptakan hubungan perdagangan bebas antara Indonesia dan UE, di mana ekspor produk Indonesia ke UE tidak dikenakan tarif impor, begitu pula sebaliknya. Mekanisme ini mendorong persaingan yang ketat di pasar, menuntut pelaku industri untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi standar tinggi IEU-CEPA. Dengan begitu, perjanjian ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri nasional untuk memperluas ekspor dan memenangkan pasar. Agar potensi IEU-CEPA dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan sinergi lintas pihak, khususnya dukungan pemerintah. Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor industri memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait IEU-CEPA, memastikan kesiapan industri, memperkuat ekosistem ekspor, menyelaraskan kebijakan antarsektor, serta menyusun regulasi yang mendukung dan kondusif bagi pertumbuhan industri nasional.

Sumber

beritasatu.com, 17 Juli 2025;

detiknews, 15 Juli 2025;

industri.kontan.co.id, 14 Juli 2025;

kompas.com, 15 dan 18 Juli 2025;

Media Indonesia, 14 Juli 2025;

mediaindonesia.com, 14 Juli 2025;

metrotvnews.com, 15 Juli 2025; dan

tempo.co, 14 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*